

## Siaran Pers

### **MEMACU PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI ASEAN G2B INFRASTRUCTURE INVESTMENT FORUM**

**JAKARTA (3/11)** – Pemerintahan Indonesia, dipimpin Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, hanya memiliki satu visi, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui tujuh Misi Presiden, yakni:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Mengacu pada tujuh misi tersebut, disusun 31 agenda strategis yang secara garis besar dapat disederhanakan menjadi sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Butir lima dan enam Nawa Cita menunjukkan bahwa daya saing dan produktivitas Indonesia menjadi perhatian khusus. Salah satu pendorong meningkatnya daya saing adalah sektor infrastruktur. Apabila diselaraskan dengan Nawa Cita, arah pembangunan infrastruktur dimulai dari penguatan konektivitas domestik dengan tidak mengesampingkan konektivitas global, khususnya regional ASEAN. ASEAN merupakan suatu komunitas sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terhubung secara lebih terbuka beberapa tahun ke depan, seiring dengan terbentuknya *ASEAN Economic Community* pada 2015. Sebagai wujud nyata visi ASEAN dalam membangun komunitas dan kebersamaan, negara-negara anggota ASEAN juga telah menyusun *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) 2025 atau Rencana Induk Konektivitas ASEAN 2025 pada September 2016. Tujuannya, menjadikan negara-negara anggota ASEAN lebih mampu bersaing secara inklusif dan mempererat ASEAN sebagai suatu komunitas.

Implementasi MPAC 2025 fokus pada lima isu strategis, yaitu *sustainable infrastructure*, *digital innovation*, *seamless logistics*, *regulatory excellence*, dan *people mobility*. Indikasi kebutuhan investasi infrastruktur negara-negara anggota ASEAN adalah sebesar US\$ 110 miliar tiap tahun. Konektivitas disasar secara menyeluruh, meliputi konektivitas institusi, konektivitas fisik, dan konektivitas antar masyarakat negara anggota ASEAN. Maka, MPAC 2025 merupakan peluang besar bagi negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia untuk meningkatkan jumlah investor bagi proyek-proyek strategis prioritas dan meningkatkan produktivitas infrastruktur.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyelenggarakan ASEAN G2B *Infrastructure Investment Forum* pada 8 November 2016 di Grand Ballroom Shangri-La Hotel, Jakarta. Acara tersebut merupakan suatu rangkaian yang tak terpisah dari *Indonesia Infrastructure Week* (IIW), yakni rangkaian kegiatan pameran dan konferensi infrastruktur tahunan yang menawarkan peluang investasi bagi para pemangku kepentingan dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemimpin perusahaan BUMN dalam rangka memfasilitasi kemitraan baru yang dapat mempercepat agenda pembangunan infrastruktur nasional.

**ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum** mengambil tema “*Enabling the Private Sector’s Participation Within the MPAC 2025*”. Di Indonesia, prakiraan kebutuhan pendanaan infrastruktur periode 2015-2019, dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi negara berpendapatan menengah (*middle income country*) pada 2025, tercatat senilai 4.796,2 triliun rupiah. Dana tersebut tersusun atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejumlah 1.978,6 triliun rupiah (41,3 persen), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 1.066,2 triliun rupiah (22,2 persen), dan partisipasi swasta senilai 1.751,5 triliun rupiah (36,5 persen). Sumber kebutuhan pendanaan berasal dari belanja kementerian/lembaga, belanja non kementerian/lembaga, biaya kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*), dana transfer daerah, permodalan nasional madani (PMN) dan *viability gap fund*.

Dengan demikian, tema **ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum** yang menekankan pentingnya peran swasta dianggap sangat tepat sasaran. Pasalnya, peran pembiayaan yang berasal dari anggaran non pemerintah dalam pendanaan infrastruktur Indonesia, termasuk anggaran swasta, mencapai 58,7 persen. **ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum** turut mengusung subtema “*National Priority Projects & Regional Leadership Perspectives*”. Dalam perhelatan yang mempertemukan unsur pemerintah dan bisnis (*Government to Business/G2B*), termasuk investor dan industri infrastruktur terkemuka dari negara anggota ASEAN dan belahan dunia lainnya tersebut, Indonesia akan memaparkan delapan proyek infrastruktur prioritas nasional, yaitu:

1. Kereta Bandara Soekarno Hatta – Halim
2. Rute Ro-Ro Bitung – General Santos – Davao
3. Bandara Internasional Kertajati (Bandara Internasional Jawa Barat)
4. Jalan Tol Sukabumi — Ciranjang — Padalarang
5. Jalan Tol Yogyakarta — Solo
6. Proyek 35.000 Megawatt
7. Pelabuhan Kuala Tanjung
8. High Speed Train (Jakarta – Surabaya)

Para narasumber akan memaparkan perkembangan proyek nasional dilanjutkan dengan diskusi para panelis yang terdiri atas perwakilan sektor swasta, BUMN, dan pemangku kepentingan terkait. Panelis diskusi memiliki pengalaman yang komprehensif, di antaranya kemampuan mengimplementasikan proyek-proyek, menginisiasi kesepakatan prosedur lintas perbatasan, hingga melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, Konektivitas ASEAN diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial yang tinggi antar negara, termasuk Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan yang akan menjadi sasaran proyek infrastruktur di masa mendatang.

Jakarta, 3 November 2016

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021) 3145374  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)